

PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN WILAYAH PENDUKUNGNYA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT

**Baiq Ismiwati¹⁾
Muhamad Sayuti²⁾**

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

²⁾Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al-Azhar - Mataram

[Email^{1\)}: ismiwati2010@gmail.com](mailto:ismiwati2010@gmail.com)

[Email^{2\)}: sayuthi.say@gmail.com](mailto:sayuthi.say@gmail.com)

ABSTRACT

This study's title was "Determining Growth Poles and its Hinterland as an Effort of Region Developing in West Lombok Regency, West Nusa Tenggara". The purpose was to know about which sub-district was the economy growth pole and its hinterland in West Nusa Tenggara Regency and to know about interaction between sub-district that took role as the growth pole with its sub-district hinterland. The method used in this study was descriptive method with documentation technique and literature study as data collection technique. Data used was quantitative data with scalogram and gravitation analysis procedure.

The result of the scalogram analysis showed that Narmada Sub-district was in the highest rank in the hierarchy level I, so it was suitable as growth pole for the Northern region of West Lombok Regency. Gerung Sub-district was in the hierarchy level II, so it was suitable as growth pole for Southern of West Lombok Regency. In the hierarchy level III were Lembar, Labuapi and Gunung Sari Sub-district. Meanwhile, the sub-district in hierarchy level IV were Sekotong, Kediri, Kuripan, Lingsar, and Batu Layar Sub-district. Base on the gravitation analysis, Sub-district that had the most powerful interaction with Narmada Sub-district was Lingsar Sub-district, meanwhile the most powerful interaction with Gerung Sub-district was Kuripan Sub-district. Sub-district that had the most powerful interaction with the growth pole Sub-district was a hinterland that had an opportunity to developed so that it can increase its economic growth.

Keywords: Growth Pole, Hinterland

PENDAHULUAN

Menurut Sun'an dan Senuk, 2015, salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan antardaerah dan antarkawasan. Menyadari akan hal itu, pemerintah mencoba untuk melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional. Pendekatan pengembangan wilayah regional dilakukan melalui penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang bertujuan untuk mengembangkan pola dan struktur ruang nasional

melalui penetapan kawasan andalan. RTRWN selanjutnya diturunkan ke tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Dalam RTRWK, pemerintah kabupaten menentukan daerah-daerah yang akan menjadi pusat kegiatan/perumbuhan yang nantinya diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah kabupaten. Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik fasilitas social, ekonomi maupun kelembagaan sehingga kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dapat menjadi lebih maju ¹(Saputra, 2016).

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan mampu mendorong pembangunan daerahnya secara keseluruhan. Posisi Kabupaten Lombok Barat yang mengelilingi kota mataram dan bentuknya memanjang dari selatan ke utara, sementara pusat pemerintahannya terletak di bagian selatan (Kecamatan Gerung), menyebabkan jarak dari beberapa kecamatan yang berada di daerah utara maupun daerah selatan cukup jauh dengan ibukota kabupaten sebagai pusat kegiatan atau pusat pertumbuhan, baik kegiatan pemerintahan maupun ekonomi, seperti yang terlihat pada tabel 1.

Tabel 1.1: Jarak Antar kecamatan di Kabupaten lombok Barat (Km)

Kecamatan	Gerung	Seko tong	Lem bar	Labu api	Kediri	Kuripan	Narmada	Lingsar	Gn Sari	Bt layar
Gerung		32,00	14,50	10,00	13,00	5,00	27,50	21,00	20,00	24,50
Sekotong	32,00		18,00	42,00	45,00	37,00	59,50	53,00	54,00	59,50
Lembar	14,50	18,00		24,50	27,50	19,50	42,00	35,50	34,50	29,00
Labuapi	10,00	42,00	24,50		23,00	15,00	37,50	31,00	30,00	34,50
Kediri	13,00	45,00	27,50	23,00		18,00	40,50	34,00	34,00	37,50
Kuripan	5,00	37,00	19,50	15,00	18,00		58,50	52,00	25,00	30,00
Narmada	27,50	59,50	42,00	37,50	40,50	58,50		5,00	20,00	25,00
Lingsar	21,00	53,00	35,50	31,00	34,00	52,00	5,00		15,00	20,00
Gng Sari	20,00	54,00	34,50	30,00	34,00	25,00	20,00	15,00		5,00
Bt layar	27,50	59,50	29,00	34,50	37,50	30,00	25,00	20,00	5,00	

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka tahun 2018

Hal ini menyebabkan kurang lancarnya interaksi antara kecamatan yang jauh dengan kecamatan pusat pertumbuhannya. Jarak dari Gerung sebagai pusat pemerintahan dengan masing-masing kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel: 1.

Secara teori, hal ini cenderung sebagai salah satu penyebab terjadinya perbedaan perkembangan antara daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan/pertumbuhan dengan yang jauh.

¹ Aditya Saputra. 2016. Pengaruh Proses dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan MNC Play Media, *Jurnal Manajemen*, Volume 12, Nomor 2.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat No.11 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat tahun 2011-2031, mengenai Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Kabupaten Lombok Barat telah menentukan pusat-pusat kegiatan yang terdiri atas:

1. PKWp (Pusat kegiatan Wilayah Promosi) di kota Gerung
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi kecamatan Lembar dan Narmada
3. PKLp di Kecamatan Gunung Sari, Kediri dan Sekotong
4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi kecamatan Batulayar, Lingsar, Labuapi, Kuripan dan Desa Pelangan
5. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) diantaranya meliputi Kediri, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, dan Senggigi.

Dengan penetapan pusat-pusat kegiatan tersebut diharapkan setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat mampu melaksanakan fungsi pelayanannya dengan baik.

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mempercepat dan pemeratakan pembangunan di suatu daerah adalah pengembangan wilayah dengan menetapkan pusat pertumbuhan. Melalui penetapan pusat pertumbuhan maka pemerintah dapat lebih fokus untuk membangun daerah tersebut, dimana nantinya diharapkan daerah pusat pertumbuhan akan dapat memberikan efek menguntungkan kepada daerah belakangnya²(Nainggolan, 2016 dalam Andriani, 2018).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan maka, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “Penentuan Pusat Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah di Kabupaten Lombok Barat”.

Rumusan Masalah

- 1) Kecamatan mana sajakah yang dapat menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Lombok Barat? 2) Kecamatan mana sajakah yang menjadi wilayah pendukung masing-masing pusat pertumbuhan? 3) Bagaimana interaksi antar kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dengan kecamatan disekitarnya atau daerah belakangnya?

² Nainggolan. 2012. Analisis Penentuan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No.12

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1).Mengetahui kecamatan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat. 2) Mengetahui kecamatan yang menjadi wilayah pendukung dalam mendorong pertumbuhan di Kabupaten Lombok Barat. 3) mengetahui interaksi antara kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan kecamatan disekitarnya/kecamatan belakangnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pusat Pertumbuhan

Menurut Tarigan (2005), pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. **Secara fungsional**, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (derah belakangnya). **Secara geografis**, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antar usaha-usaha tersebut.

Menurut Tarigan, pusat pertumbuhan harus memiliki 4 ciri, yaitu: 1) **Adanya hubungan internal dari berbagai kegiatan yang memiliki hubungan ekonomi**. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya, sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh maka akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. 2) **Ada efek pengganda (*multiplier effect*)**. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan, sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut. 3) **Adanya konsentrasi geografis**. Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa

mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. 4). **Bersifat mendorong daerah belakangnya.** Terdapat hubungan yang harmonis antara kota dengan wilayah belakangnya. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Hirarki Perkotaan

Setiap kota memiliki daerah belakang atau wilayah pengaruhnya. Makin besar suatu kota, makin beragam fasilitas yang disediakan sehingga makin luas wilayah pengaruhnya. Suatu kota yang besar, selain memiliki daerah belakang yang berupa daerah pertanian juga memiliki beberapa kota kecil. Apabila kota kecil banyak tergantung dari kota besar, maka kota kecil termasuk di dalam daerah pengaruh dari kota yang lebih besar. Biasanya kota yang paling besar wilayah pengaruhnya, diberikan ranking satu atau kota orde kesatu, yang lebih kecil berikutnya diberi ranking dua, dan seterusnya (Tarigan, 2005). Kota orde kesatu tidak merupakan subordinat kota lain. Kota orde kedua berada dalam subordinat kota ranking kesatu dan kota orde ketiga berada dalam subordinat kota orde kedua, dan seterusnya.

Menurut Tarigan (2005), penentuan orde perkotaan dapat didasarkan atas gabungan beberapa variabel, variabel yang umum dianggap berpengaruh dalam menetapkan orde perkotaan adalah:

1. Jumlah penduduk perkotaan.

Setelah seluruh kota dalam wilayah analisis diidentifikasi, dihitung jumlah penduduk di setiap kota. Kemudian kota diurutkan berdasarkan jumlah penduduknya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah itu kota-kota itu dibagi dalam beberapa kelas. Jumlah kelas sama dengan jumlah orde perkotaan yang diinginkan. Dalam menentukan jumlah kelas, digunakan rumus Sturges, yaitu $k = 1 + 3,3 \log n =$ banyaknya kota.

2. Banyaknya fasilitas yang dimiliki, seperti luas pasar, luas kompleks pertokoan, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, beragam jasa yang dimiliki (spt jasa bank, jasa asuransi, jasa perbengkelan) dan lainnya.
3. Tingkat aksesibilitas dari kota tersebut terhadap kota terdekat yang memiliki orde lebih tinggi di wilayah itu (misalnya ibukota kabupaten/ibukota provinsi).

Mengukur tingkat aksesibilitas suatu kota/lokasi biasanya menggunakan rumus gravitasi. Rumus sederhana yang dapat digunakan adalah: $T_{ij} = k ((P_i P_j)/d_{ij}^b)$, dimana T_{ij} = jumlah trip antara kota i dengan kota j; P_i = penduduk kota I (kota yang dianalisis); P_j = penduduk kota j (kota terdekat yang ordenya lebih tinggi); d_{ij} = jarak antara kota i dengan kota j; b = pangkat dari d_{ij} , menggambarkan cepatnya jumlah trip menurun seiring dengan pertambahan jarak dan k = konstanta.

Dengan menggunakan rumus diatas, maka aksesibilitas tiap kota dapat dihitung. Kemudian semua kota diurutkan mulai dari T_{ij} tertinggi ke T_{ij} terendah. Urutan kota itu dibagi dalam kelas dengan interval yang sama. Jumlah kelas sama dengan analisis penduduk. Setelah kelas kota untuk semua faktor dapat dihitung, maka kelas untuk tiap kota itu digabung dan dicari rata-ratanya (per kota). Rata-rata tiap kota diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah kemudian dibagi dalam kelas. Kota yang berada pada kelas 1 dinyatakan sebagai kota orde I. kota yang berada pada kelas 2 dinyatakan sebagai kota orde II. Kota yang berada pada kelas 3 dinyatakan sebagai kota orde 3.

Daerah *Hinterland*

Hinterland merupakan daerah belakang yang berfungsi untuk memenuhi atau memasok kebutuhan pangan atau kebutuhan bahan makanan pokok seperti padi, buah-buahan, jagung serta palawija. Penentuan daerah *hinterland* berupa kecamatan atau desa didasarkan atas jarak atau radius keterikatan desa atau kecamatan pada kawasan sentra produksi baik ekonomi dan pelayanan. Beberapa fungsi kota sebagai bagian dari *hinterland* antara lain: 1). Kota utama yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. 2). Kota kedua, yang melayani wilayah sub regional dan menjembatani antara kota-kota utama dan kota-kota kecil.

Menurut Bintarto, fungsi daerah *hinterland* sebagai berikut: (a) Dalam interaksi desa-kota, *hinterland* berfungsi sebagai daerah dukung (*hinterland*) atau daerah pensuplai bahan makanan pokok, seperti nasi, jagung, ketela, kacang, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran dan daging hewan. (b) Daerah *hinterland* berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) ditinjau dari sisi potensi ekonomi. (c) Dari sisi kegiatan kerja (*occupation*), daerah *hinterland* dapat berfungsi sebagai desa agraris, manufaktur, desa industri dan desa nelayan.

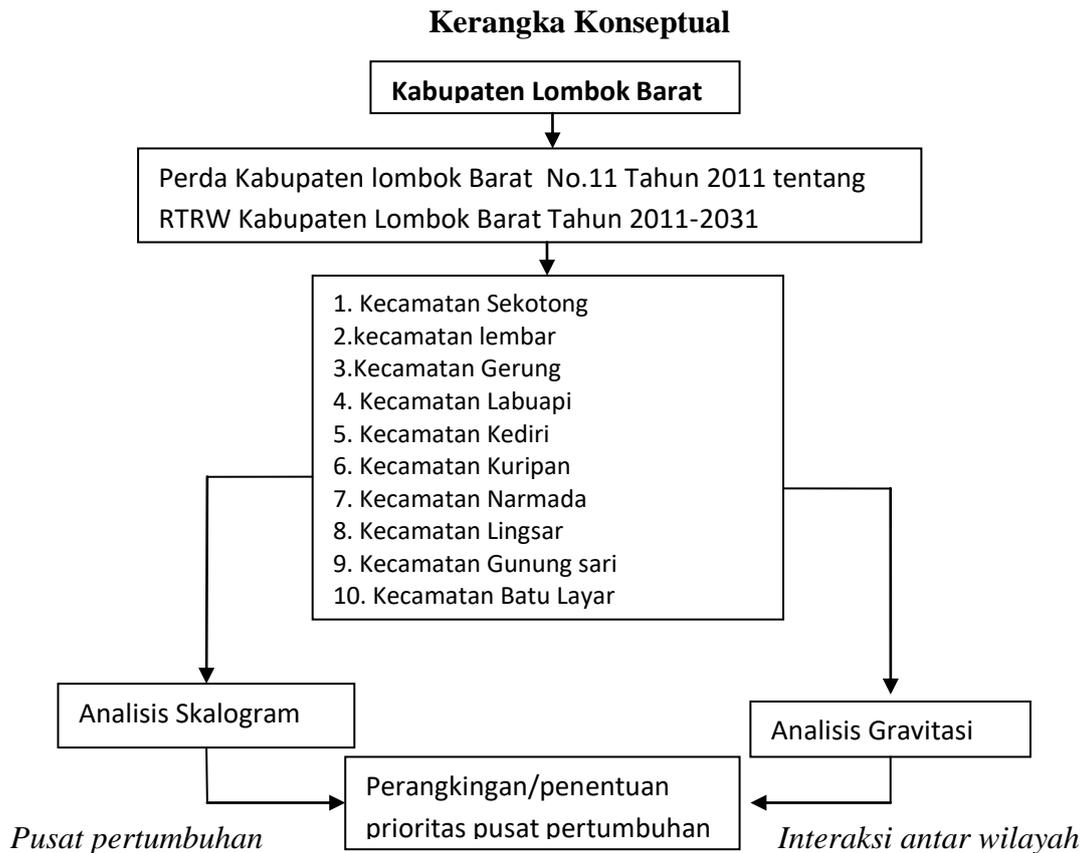
Analisis Skalogram

Metode skalogram merupakan metode paling sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan analisis fungsi wilayah. Metode ini hanya menunjukkan daftar dan komponen-komponen pendukungnya (Riyadi,2003 dalam Adriani). Komponen-komponen yang dibutuhkan biasanya meliputi: (1). Data pemukiman wilayah yang ditinjau, (2). Jumlah penduduk/populasi masing-masing pemukiman, (3). Data fungsi/fasilitas pelayanan yang terdapat pada setiap pemukiman.

Cara menyusun dan menetapkan ranking atau tingkat kota-kota adalah sebagai berikut (Budiharjo,2007;12 dalam Adriani,2018;39): **1)** Wilayah kecamatan disusun urutannya berdasarkan jumlah penduduk;**2)** Kemudian kecamatan tersebut disusun urutannya berdasarkan atas jumlah jenis fasilitas social dan ekonomi yang tersedia; **3)** Masing-masing jenis fasilitas tersebut disusun urutannya pada semua wilayah yang memiliki jenis fasilitas tertentu; **4)** Ranking atau peringkat fasilitas social dan ekonomi disusun urutannya berdasarkan atas jumlah unit fasilitas tersebut; **5)** Ranking kota kecamatan/wilayah ditentukan berdasarkan jumlah jenis dan jumlah unit fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing unit.

Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian penelitian serupa telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2012) yang berjudul “Analisis Penentuan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis skalogram dan analisis gravitasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kecamatan pusat pertumbuhan yang paling kuat dengan Kecamatan Gunung Malela sebagi wilayah *hinterlandnya*. Kecamatan Pusat pertumbuhan Bandar memiliki interaksi yang paling kuat dengan kecamatan Pematang Bandar. Kecamatan Tanah Jawa sebagai kecamatan pusat pertumbuhan memiliki interaksi paling kuat dengan kecamatan Hatonduhan. Kecamatan Raya memiliki interaksi paling kuat dengan kecamatan Panel sebagai Kecamatan *hinterlandnya*.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode untuk melakukan pengukuran secara cermat terhadap fenomena yang ada dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan Studi kepustakaan, dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa fasilitas pelayanan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, jarak antar kecamatan, data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat per kecamatan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat statistik Kabupaten Lombok Barat, dan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat.

Adapun **variabel-variabel dalam penelitian** ini adalah: 1) Jumlah penduduk, 2) Jarak, 3) interaksi daerah/Kecamatan dan Fasilitas pelayanan social ekonomi yang ada di kabupaten Lombok Barat.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan **analisis skalogram** dan **model gravitasi**.

Persamaan untuk mencari banyaknya kelas dari tiap-tiap kecamatan sebagai pusat pertumbuhan adalah: $k = 1 + 3,3 \log n$, dimana k = banyaknya kelas dan n = banyaknya kecamatan. Besarnya interval kelas dicari dengan rumus: $I = (A - B) / k$, dimana A = jumlah fasilitas tertinggi dan B = jumlah fasilitas terendah.

Selanjutnya model gravitasi digunakan untuk mengetahui interaksi ekonomi pusat pertumbuhan dengan daerah pendukungnya dan mencari daerah mana di sekitar pusat pertumbuhan yang memiliki interaksi paling kuat dengan kawasan lainnya serta mengetahui peran kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Lombok Barat. Rumus model Gravitasi adalah: $T_{ij} = \alpha ((P_i \times P_j)/D_{ij}^b)$, dimana $\alpha = 1$ dan $b = 2$

PEMBAHASAN

1. Analisis Skalogram

Untuk menentukan hirarki wilayah yang ada di Kabupaten Lombok Barat digunakan analisis skalogram yang didasarkan atas ketersediaan fasilitas pelayanan yang meliputi fasilitas social dan ekonomi di daerah ini. Tingkat hirarki ini penting dalam penentuan kapasitas suatu wilayah, apakah wilayah merupakan wilayah pusat atau wilayah pendukung (*hinterland*).

Berdasarkan perhitungan terhadap jumlah total unit fasilitas social dan ekonomi yang ada di tiap kecamatan, teridentifikasi bahwa Kecamatan Narmada memiliki fasilitas yang terbanyak di Kabupaten Lombok Barat. Secara lebih lengkap untuk hirarki pusat pertumbuhan kecamatan berdasarkan analisis skalogram dapat dilihat pada tabel 7

Tabel 1: Hirarki Pelayanan Social dan Ekonomi di Kabupaten Lombok Barat dirinci Per Kecamatan tahun 2017

No	Kecamatan	Nilai Ketersediaan Fasilitas					
		sosial			ekonomi	Total	Tingkat Hirarki (orde)
		Pendidikan	Kesehatan	Tempat Ibadah			
1	Sekotong	86	22	121	52	281	IV
2	Lembar	72	17	180	145	414	III
3	Gerung	122	30	227	70	449	II
4	Labuapi	71	20	173	68	332	III

5	Kediri	94	18	147	54	313	IV
6	Kuripan	47	13	125	35	220	IV
7	Narmada	128	35	205	258	626	I
8	Lingsar	76	24	149	21	270	IV
9	Gunung Sari	111	29	116	109	365	III
10	Batu layar	69	12	83	142	306	IV
	Kab. Lombok Barat	876	220	1.526	954	3.576	

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka tahun 2018

Dari hasil perhitungan diperoleh hirarki/orde wilayah di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 4 kelas ($k = 1 + 3,3 \log 10 = 4,3$, dibulatkan menjadi 4). Selanjutnya untuk menentukan besarnya interval kelas, dengan rumus: $I = (\text{Jumlah fasilitas tertinggi} - \text{Jumlah fasilitas terendah})/k$. Dari tabel 8 diperoleh jumlah fasilitas tertinggi adalah 626 dan jumlah fasilitas terendah adalah 220 dan dengan menggunakan rumus tersebut didapatkan interval kelas sebesar 101,5. Jadi 4 wilayah hirarki adalah sebagai berikut:

- A) Wilayah Hirarki I = $626 \geq X \geq 524,5$; B) Wilayah Hirarki II = $524,5 > X \geq 423$;
C) Wilayah Hirarki III = $423 > X \geq 321,5$; D) Wilayah Hirarki IV = $321,5 > X \geq 220$

Jadi di Kabupaten Lombok Barat dapat dikelompokkan dalam empat hirarki pusat pelayanan/pertumbuhan, yakni:

1. Tingkat hirarki I (tinggi), merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan tinggi. Kecamatan yang masuk dalam hirarki I adalah kecamatan Narmada dengan nilai ketersediaan fasilitas sebanyak 626 unit.
2. Tingkat hirarki II (sedang), merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan sedang. Kecamatan yang masuk dalam hirarki II adalah kecamatan Gerung dengan nilai ketersediaan fasilitas sebanyak 449 unit.
3. Tingkat hirarki III (rendah), merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan rendah. Kecamatan yang masuk dalam hirarki III adalah kecamatan Lembar, Gunung Sari dan Kecamatan Labuapi, dengan nilai ketersediaan fasilitas masing-masing sebanyak 414 unit, 365 unit dan 332 unit.
4. Tingkat hirarki IV (sangat rendah), merupakan wilayah dengan tingkat ketersediaan fasilitas yang kurang jika dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas pada Kecamatan yang berada pada wilayah hirarki I, II, dan III. Kecamatan yang masuk dalam hirarki IV adalah Kecamatan Kediri, Batu Layar, Sekotong, Lingsar dan

Kecamatan Kuripan, dengan jumlah fasilitas masing masing sebanyak 313, 306, 281, 270 dan 220 unit.

Dari tingkat hirarki yang telah didapatkan dapat ditentukan orde pusat pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut: Orde I adalah Kecamatan Narmada, Orde II adalah Kecamatan Gerung, orde III adalah Kecamatan Lembar, Gunung Sari, dan Kecamatan Labuapi, sementara orde IV terdiri dari lima kecamatan, Kecamatan Kediri, Batu Layar, Sekotong, Lingsar dan Kecamatan Kuripan.

Wilayah Pendukung (*Hinterland*)

Wilayah pendukung kecamatan Naramada(orde I) sebagai pusat pertumbuhan adalah Kecamatan lingsar dan Kecamatan Kediri. Sementara Kecamatan Gerung Orde II) sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Barat, kecamatan pendukungnya adalah: Kecamatan Lembar, Sekotong, Kuripan, Kediri dan Kecamatan Labuapi.

2. Analisis Gravitasi

Analisis gravitasi dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara dua daerah (kecamatan). Berikut hasil interaksi pusat pertumbuhan dengan kecamatan pendukung di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 2: Hasil Interaksi Kecamatan Pusat Pertumbuhan dengan Kecamatan Sekitarnya (analisis gravitasi)

No	Kec. Asal	Kec. Tujuan	Penduduk Daerah asal	Penduduk Daerah Tujuan	Jarak i-j (Km)	Jarak (i-J) ²	Angka Interaksi
	(i)	(j)	(pi)	(pj)	(dij)	(Dij) ²	(Tij)
1	Narmada	Lingsar	93.098	69.182	5	25	257.628.234
		Kediri	93.098	57.723	5	25	214.955.834
2	Gerung	Labuapi	82.596	65.978	10	100	54.495.188,9
		Kediri	82.596	57.723	13	169	28.211.177
		Kuripan	82.596	37.733	5	25	124.663.795
		Lembar	82.596	49.976	14,5	210,25	19.632.902
		Sekotong	82.596	70.410	32	1.024	5.679.281,6

Sumber: diolah dari tabel 1 dan tabel 2 (jumlah penduduk masing-masing kecamatan)

3. Interpretasi Hasil Perhitungan

Dari hasil analisis skalogram didapatkan bahwa kecamatan narmada merupakan kecamatan yang mendapatkan tingkat hirarki I atau berada pada Orde I. Hal ini

menunjukkan Kecamatan ini cocok menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat dengan tingkat perkembangan yang tinggi, karena ketersediaan fasilitas sangat memadai yakni sebanyak 626 unit . Kecamatan ini juga mendapat dukungan yang kuat dari daerah hinterlandnya yakni kecamatan Lingsar (nilai indeks gravitasi 257.628.234) dan kecamatan Kediri (nilai indeks Gravitasi 214.955.834) . Kedua kecamatan pendukung dari Kecamatan Narmada ini hanya berjarak 5 kilo meter, yang artinya memberikan kemudahan bagi kedua kecamatan untuk berinteraksi dengan pusat pertumbuhan Narmada.

Gerung sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus pusat pertumbuhan kabupaten Lombok Barat selama ini, dapat juga dikatakan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Lombok Barat bagian selatan meski dilihat dari hasil analisis skalogram berada pada orde II dengan nilai ketersediaan fasilitas 449 unit. Dari hasil perhitungan analisis gravitasi, Gerung sebagai pusat pertumbuhan, didukung oleh kecamatan-kecamatan sekitarnya sebagai daerah *hinterlandnya*, yakni kecamatan Kuripan, Labuapi, Kediri, Lembar dan Kecamatan Sekotong, meski interaksi dari kesemua kecamatan pendukung ini dengan Gerung tidak sekuat interaksi kedua kecamatan pendukung Kecamatan Narmada. Masing-masing kecamatan pendukung dari Kecamatan Gerung sebagai pusat pertumbuhan memiliki keeratan interaksi yang berbeda beda. Interaksi yang terkuat adalah dengan kecamatan kuripan dengan nilai indeks gravitasi sebesar 124.663.795. Sementara kecamatan pendukung (*hinterland*) yang memiliki interaksi paling kecil dengan kecamatan Gerung adalah Kecamatan Sekotong dengan Nilai Indeks gravitasi sebesar 5.679.281,6. Kecamatan sekotong merupakan kecamatan yang memiliki jarak yang paling jauh dari pusat pertumbuhan Kecamatan Gerung, yakni sejauh 32 kilo meter, yang notebene menyebabkan interaksi antara kedua kecamatan akan membutuhkan waktu yang lama.

Dari kedua analisis yang digunakan Kecamatan Narmada merupakan kecamatan yang paling cocok digunakan sebagai pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, khususnya untuk pusat kegiatan ekonomi, karena dilihat dari fasilitas ekonomi yang tersedia Kecamatan Narmada jumlahnya jauh lebih banyak dari kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya Pusat Pertumbuhan Kecamatan Narmada, diharapkan akan melayani wilayah wilayah Kabupaten Lombok Barat yang berada di bagian utara seperti kecamatan Lingsar, Gunung Sari ataupun Kecamatan Senggigi,

sehingga terjadi pemerataan dalam pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat

Kecamatan Gerung sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat berada pada tingkat Hirarki/orde II. Dari sisi fasilitas kecamatan ini masih jauh lebih sedikit dari kecamatan Narmada yang teridentifikasi berada pada orde I, meski kecamatan Gerung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Dengan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan, Kecamatan gerung mempunyai potensi yang besar untuk semakin berkembang dan dapat memiliki fasilitas yang lebih banyak lagi sehingga nantinya bisa menjadi orde I. Berdasarkan teori, daerah yang teridentifikasi berada pada orde II dapat melayani daerah yang berada di orde III, IV atau V, tergantung jumlah kelas yang ada pada suatu daerah. Jadi Kecamatan Gerung dapat dijadikan pusat pertumbuhan yang akan melayani daerah-daerah yang ada disekitarnya yakni Kecamatan Kuripan, Labuapi, Lembar dan Kecamatan Sekotong. Dengan berbagai fasilitas pelayanan yang dimiliki, seperti fasilitas social, ekonomi, dan pemerintahan maka daerah pendukungnya akan mudah untuk berinteraksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan apa yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Dari 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat teridentifikasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah Kecamatan Narmada yang berada pada orde I dan Kecamatan Gerung berada pada orde II
2. Wilayah pendukung (*hinterland*) Kecamatan Narmada sebagai pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Kediri. Sementara wilayah pendukung (*hinterland*) Kecamatan Gerung sebagai pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Kuripan, Labuapi, Lembar dan Kecamatan Sekotong.
3. Kecamatan Narmada sebagai pusat pertumbuhan memiliki interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Lingsar sebagai wilayah pendukungnya.

2. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten perlu mempertimbangkan untuk menjadikan Kecamatan Narmada sebagai Pusat pertumbuhan wilayah kabupaten lombok Barat bagian Utara,

sehingga dapat membantu percepatan pembangunan kecamatan-kecamatan yang ada di bagian utara.

2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan (social dan ekonomi) di Kecamatan Gerung sebagai pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten bagian selatan sehingga dapat membantu mempercepat perkembangan daerah *hinterlandnya* dan dapat lebih memperkuat interaksi diantara kecamatan Gerung dengan daerah-daerah *hinterlandnya*.

DAFTAR PUSTAKA

- , *RTRW Kabupaten Lombok Barat 2011 – 2031*
- Andriani, Desi. 2018. *Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Dompu*. Universitas Mataram: Mataram
- BPS Kabupaten Lombok Barat.2018. *Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2018*.
- Nainggolan. 2012. Analisis Penentuan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1 No.12
- Saputra Aditya. 2016. Pengaruh Proses dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan MNC Play Media, *Jurnal Manajemen*, Volume 12, Nomor 2.
- Sun'an, Muammil dan Senuk, A. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta. Penerbit Mitra Wacana Media
- Tarigan. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Penerbit PT Bumi Aksara